

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius dan kompleks di Indonesia. Stunting bukanlah merupakan masalah kesehatan baru yang terjadi di Indonesia, khususnya pada provinsi DKI Jakarta. Karena tingginya angka kasus, stunting dijadikan sebagai salah satu isu prioritas. Stunting, atau pertumbuhan terhambat pada anak, merupakan kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan tubuhnya tidak mencapai tinggi badan yang seharusnya sesuai dengan usianya.

Menurut WHO pada tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Definisi stunting menurut WHO mengalami perubahan, yakni pada tahun 2020 definisi stunting menurut WHO adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, yang terjadi dikarenakan kondisi ireversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang sehingga mengalami kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun (WHO, 2020).

Menurut Kemenkes RI pada tahun 2022, stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan (Kemenkes RI, 2023). Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Kekurangan gizi yang semakin menurun di setiap tahunnya dan berlangsung dalam waktu lama menyebabkan keterlambatan perkembangan otot dan anak. Akibat terpapar stunting, anak akan mengalami penurunan kesehatan dari tahun ke tahun dan menjadi rentan terpapar berbagai penyakit. Bahayanya, anak yang menderita stunting akan berisiko

terkena penyakit degeneratif saat usia dewasa, yakni perubahan sel tubuh yang pada akhirnya mempengaruhi fungsi organ tubuh secara keseluruhan. Anak yang menderita stunting pada umumnya akan memiliki postur tubuh pendek, serta mengalami gangguan perkembangan motorik dan kognitif.

Dampak stunting pada anak sangat merugikan, karena dapat berpengaruh pada produktivitas dan kualitas hidupnya di masa dewasa terutama stunting yang terjadi pada anak usia dini, karena stunting memiliki dampak jangka panjang seperti penurunan kemampuan kognitif, perkembangan fisik, kesehatan yang buruk, dan reproduksi anak yang tertunda. Produktivitas anak juga akan berpengaruh terutama pada masa bonus demografi pada tahun 2045, masa dimana jumlah populasi usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan populasi usia non-produktif (lebih 64 tahun). Jika stunting tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka akan mengancam kualitas generasi penerus di masa depan (Kemenkes RI, 2018). Guna mewujudkan Indonesia Maju 2045, maka permasalahan stunting yang dihadapi oleh bangsa ini harus dapat diatasi bersama.

Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutan di Pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023, menyampaikan bahwa dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh karena itu, diharapkan target persentase stunting di Indonesia pada tahun 2024 dapat turun hingga 14 persen dari sebanyak 21,6 persen jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2022. Presiden Republik Indonesia juga yakin bahwa dengan kekuatan bersama maka angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai, asal semuanya bekerja bersama-sama (Badan Kebijakan Kemenkes RI, 2022). Atas dasar ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh elemen pemerintahan baik dari nasional maupun daerah, harus gotong royong menekan angka stunting di Indonesia.

**Stunting menurun, namun perlu percepatan untuk mencapai target 14% di tahun 2024**

% Angka stunting 2007-2021 dan target 2024:



**Gambar 1.1-Grafik angka stunting di Indonesia tahun 2007-2021**

Pada tahun 2022, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, sebesar 110 ribu balita terpapar stunting di DKI Jakarta dari sekitar 790 ribu balita atau sekitar 14,8%. Artinya, sekitar 14 dari 100 balita di Ibu Kota memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Angka prevalensi stunting DKI Jakarta tersebut menurun dibanding 2021, sekaligus mencapai level terbaiknya dalam tujuh tahun terakhir seperti terlihat pada grafik (Databoks, 2023).



**Gambar 1.2-Grafik Prevalensi Stunting di DKI Jakarta tahun 2015-2022**

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi kedua yang memiliki prevalensi stunting terendah di Indonesia pada tahun 2022 yakni sebesar 14,8% (Databoks, 2023).

Prevalensi Balita Stunting DKI Jakarta (2015-2022)

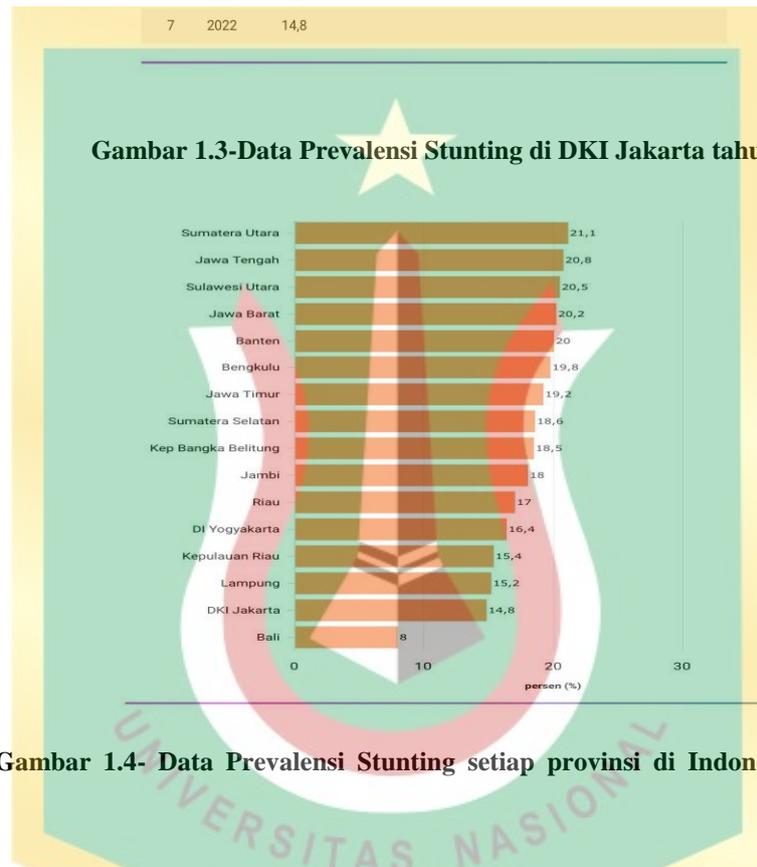
databoks



No Nama Prevalensi Balita Stunting DKI Jakarta / Persen

No	Nama	Prevalensi Balita Stunting DKI Jakarta / Persen
1	2015	23
2	2016	20,06
3	2017	22,7
4	2018	17,6
5	2019	19,96
6	2021	16,8
7	2022	14,8

Gambar 1.3-Data Prevalensi Stunting di DKI Jakarta tahun 2015-2022

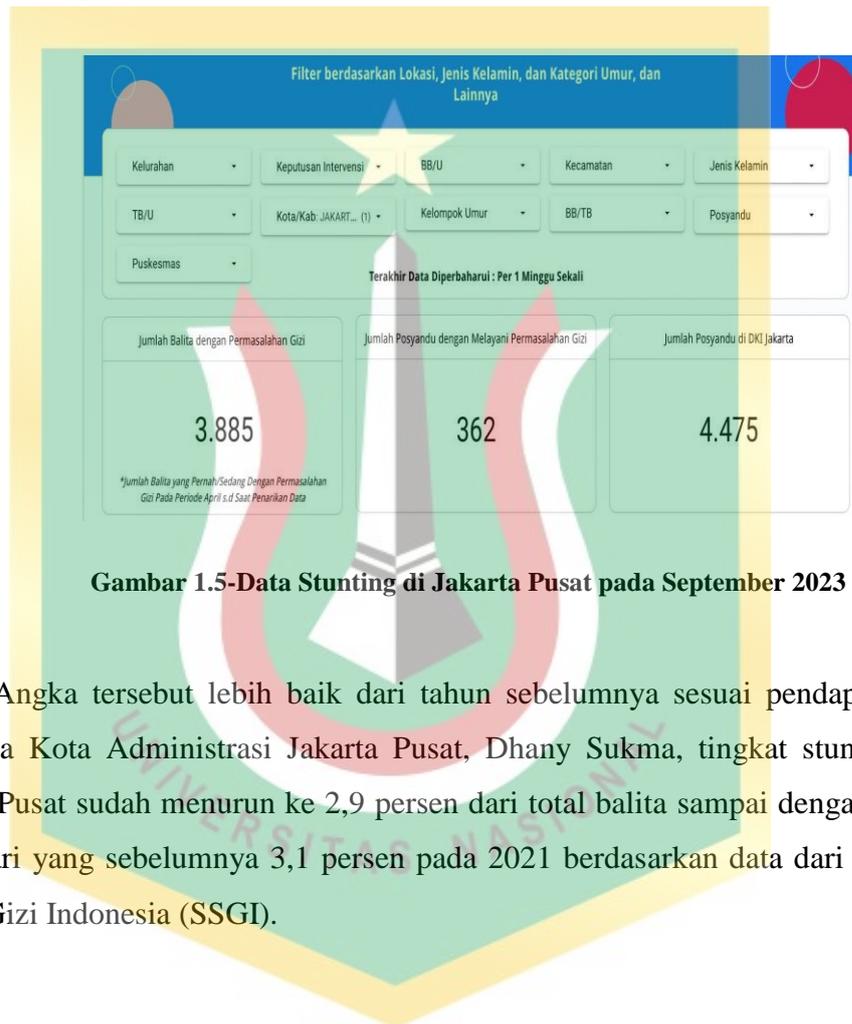


Gambar 1.4- Data Prevalensi Stunting setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2022.

Pada konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta tanggal 1 Februari 2023, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi mengungkapkan bahwa penurunan angka stunting di Jakarta mencapai angka 5% dari 14,8 %, hal ini mengacu pada negara-negara maju, yakni perlu adanya satu provinsi di Indonesia untuk dijadikan contoh sebagaimana yang telah diterapkan di negara maju (Republika, 2023). Walaupun DKI Jakarta sudah dekat dalam mencapai target nasional, namun stunting tetap menjadi permasalahan yang tengah difokuskan oleh pemerintah untuk segera diberantas. Di tanggal dan lokasi yang sama, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan memantau secara

langsung penurunan angka stunting. Hal ini dikarenakan, DKI Jakarta akan dijadikan contoh provinsi dengan angka stunting rendah dan diharapkan dapat diikuti oleh wilayah lainnya di Indonesia.

Sebagai pusat nya kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat juga memiliki masalah serius perihal stunting. Berdasarkan data, pada bulan September tahun 2023, sebanyak 3.885 anak menderita stunting di Kota Jakarta Pusat (Stunting Jakarta, 2023).



**Gambar 1.5-Data Stunting di Jakarta Pusat pada September 2023**

Angka tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya sesuai pendapat dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhany Sukma, tingkat stunting di Jakarta Pusat sudah menurun ke 2,9 persen dari total balita sampai dengan akhir 2022 dari yang sebelumnya 3,1 persen pada 2021 berdasarkan data dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI).



**Gambar 1.6-Perbandingan Jumlah Prevalensi Stunting di Indonesia, DKI Jakarta, dan kota Jakarta Pusat pada tahun 2019-2022**

Dhanny Sukma turut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jakarta Pusat menargetkan prevalensi stunting di wilayah tersebut dapat dieliminasi atau mencapai nol persen pada tahun 2024 (Antara News, 2023). Saat ini, Jakarta pusat menempati posisi kedua kasus stunting terendah di DKI Jakarta atau berada di satu posisi bawah dari Kota Administrasi Jakarta Selatan, yakni sebanyak 14% (Databoks, 2023).

- Kabupaten Kepulauan Seribu: 20,50%
- Kota Jakarta Utara: 18,50%
- Kota Jakarta Barat: 15,20%
- Kota Jakarta Timur: 14,40%
- Kota Jakarta Pusat: 14,00%
- Kota Jakarta Selatan: 11,90%

**Gambar 1.7-Persentase stunting pada setiap kota di DKI Jakarta**

Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai objek dari penelitian ini dikarenakan termasuk memiliki kasus stunting terendah, walaupun angka stunting paling rendah berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suatu hal yang wajar jika Jakarta Selatan menjadi kota terendah angka stunting karena tingkat pemukiman kumuh lebih rendah yakni sebanyak 90 RW. Tentunya, semakin rendah pemukiman kumuh maka kualitas hidup semakin baik dan

menandakan bahwa ekonomi masyarakatnya berada di tingkat yang baik sehingga stunting pun memegang angka rendah. Sebuah fenomena, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memegang predikat pemukiman kumuh terbanyak di DKI Jakarta pada tahun 2022 yakni sebanyak 99 RW, namun menjadi kota kedua dengan angka stunting terendah di DKI Jakarta.

Permasalahan stunting merupakan permasalahan signifikan yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Pusat dan menjadikannya sebagai masalah kesehatan masyarakat yang mendapatkan perhatian serius. Dalam rangka penyelesaian masalah Stunting ini, sesuai amanat dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Pemerintah Daerah turut menerapkan aksi konvergensi intervensi, yang terdiri dari delapan tahapan, antara lain (DJKN Kemenkeu RI, 2023):

- Aksi 1:  
Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- Aksi 2:  
Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- Aksi 3:  
Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.
- Aksi 4:  
Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- Aksi 5:  
Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
- Aksi 6:  
Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.

- Aksi 7:  
Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
- Aksi 8:  
Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupaya menekan angka stunting di Jakarta Pusat dengan memperbaiki kualitas hidup keluarga dan lingkungan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta membuat beberapa kebijakan untuk penurunan angka stunting. Beberapa kebijakan tersebut adalah perbaikan pengolahan dan distribusi air bersih serta program bedah rumah dan perbaikan kualitas sanitasi dan ventilasi rumah masyarakat. Upaya menekan stunting juga melalui penyuluhan gizi seimbang dan pembinaan pengasuhan orang tua juga akan terus didorong, katanya menambahkan (Antara News, 2023).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk penekanan angka stunting. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bagian Kesejahteraan Rakyat bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan TP-PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat telah merancang dan mengimplementasikan berbagai upaya sosialisasi stunting. Salah satunya adalah melalui program "Jakarta Beraksi", yakni program Jakarta Bergerak Atasi Stunting, yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting di wilayah Jakarta Pusat melalui pemberian bantuan makanan bergizi. Program ini memerlukan dukungan komunikasi yang efektif agar informasi dan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan *awareness* terhadap stunting. Supaya dapat terkomunikasikan dengan baik, pemerintah memerlukan dukungan lintas sektoral untuk dokumentasi dan publikasi sebagai teknisi komunikasi. Dukungan ini dapat diberikan oleh Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dijalankan oleh Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat.

Komunikasi publik diartikan sebagai bentuk pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada di dalam sebuah organisasi atau berada di luar

organisasi, secara tatap muka atau melalui media (Adelia, W. S., Sinaga, B., & Nasution, H, 2020 : 12-25). Dapat dikatakan bahwa komunikasi publik adalah bentuk komunikasi strategis kepada khalayak luas, sesuai dengan pendapat, komunikasi publik biasanya disampaikan kepada khalayak yang jumlahnya banyak. Pesan yang disampaikan pada komunikasi publik berupa penyampaian informasi terencana tentang topik tertentu dan terjadi pada sebuah organisasi atau instansi.

Komunikasi publik dalam pelaksanaannya dapat tercermin melalui kegiatan *public relations*. Prinsip yang harus dijalankan adalah hubungan sambil berinteraksi antara organisasi dengan publiknya. Hubungan Masyarakat melibatkan komunikasi dua arah dengan public secara bersamaan untuk mendukung fungsi dan tujuan manajemen, dengan meningkatkan kerjasama dan memenuhi kepentingan bersama. Selain itu, diperlukan kemampuan humas untuk membuat orang lain memahami suatu pesan, dengan tujuan memperkuat kesetaraan informasi dan keterbukaan

Dasar pemikiran humas dalam lingkup pemerintahan berlandaskan pada dua aspek pokok. Pertama, hak Masyarakat untuk mendapatkan informasi menjadi pijakan utama. Oleh karena itu, para pejabat pemerintah dan stafnya memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kedua, terdapat kebutuhan bagi pejabat dan staf pemerintah untuk menerima masukan dari masyarakat ada kebutuhan bagi para pejabat dan jajarannya untuk menerima masukan dari masyarakat terkait isu-isu baru dan tekanan sosial, sebagai Langkah untuk mendapatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya melalui proses komunikasi ini, pemerintah dan warga nya dapat mencapai pemahaman bersama yang positif. Praktisi humas perlu memiliki keterampilan dalam membentuk nilai-nilai, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan kebutuhan organisasi. Mereka harus dapat mengarahkan perhatian masyarakat sehingga focus pada pesan yang disampaikan. Tidak hanya itu, pesan yang disampaikan juga harus mampu memberikan dampak yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencapai kepentingan bersama.

Fungsi Humas pemerintah melibatkan upaya Pendidikan kepada masyarakat untuk memfasilitasi terbentuknya hubungan sosialisasi yang positif.

Peran yang krusial dimainkan oleh humas pemerintah kota dalam mendukung Upaya pemberantasan stunting sebagai alat komunikasi public. Tugas humas melibatkan penyampaian informasi, Pembangunan pemahaman, dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Secara esensial, humas merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjembatani hubungan antara organisasi dan stakeholder, baik yang berada di luar maupun di dalam organisasi. Apapun yang terjadi di organisasi, humas wajib memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan dan tujuan organisasi. Humas memiliki peran penting sebagai perantara antara kepentingan pemerintahan dan masyarakat di daerah, serta dengan pihak-pihak lain dalam Upaya meningkatkan kinerja Pembangunan dan kegiatan pemerintahan di masyarakat. Salah satu tanggung jawab humas yakni membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan menjaga reputasi instansi di mata masyarakat, dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat.

Peran humas dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang penting untuk berkomunikasi baik terhadap internal maupun eksternal. Humas memiliki peran sebagai mediator yang menjembatani dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan program yang dilakukan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. dan bertujuan untuk mengedukasi, mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar dapat berkontribusi dengan pihak pemerintah untuk ikut hadir menurunkan angka stunting di Jakarta Pusat melalui publikasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang jelas terkait program-program dalam menurunkan angka stunting, seperti bagaimana pemberian gizi yang baik sehingga dapat meningkatkan *awareness* terhadap stunting di masyarakat Jakarta Pusat.

Namun, dalam konteks pengembangan peran Humas dalam Program Berantas Stunting di Jakarta Pusat, masih terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran Humas pemerintah kota telah dijalankan dengan efektif dalam berkomunikasi dengan publik terkait masalah stunting, serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kesuksesan komunikasi publik dalam program ini.

Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji dan menganalisis peran

humas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai teknisi komunikasi dalam mendukung sosialisasi Stunting di Jakarta Pusat pada tahun 2023. Dalam proses ini, penelitian ini akan melibatkan analisis data, studi literatur, serta wawancara dengan praktisi dan pejabat pemerintah terkait untuk memahami peran humas pemerintah kota sebagai teknisi komunikasi dalam upaya sosialisasi stunting

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana peran Humas pemerintah kota telah efektif dalam mendukung program berantas stunting, serta rekomendasi yang mungkin dapat membantu perbaikan peran humas pemerintah kota sebagai teknisi komunikasi dalam sosialisasi stunting di Jakarta Pusat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas pokok permasalahan dari penelitian ialah: “Bagaimana peran humas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai teknisi komunikasi dalam sosialisasi stunting di Jakarta Pusat pada tahun 2023?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana peran humas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai teknisi komunikasi dalam sosialisasi stunting di Jakarta Pusat pada tahun 2023.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan point yang sudah dijelaskan di atas, manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang bisa digunakan sebagai acuan di bidang penelitian humas.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

#### A. Dari Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan serta keahlian peneliti ketika melakukan penelitian, serta bermanfaat dalam memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1.

#### B. Dari Universitas Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat guna bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

#### C. Dari Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat bagi Suku Dinas Kominfotik Jakarta Pusat yang berperan sebagai Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna masukan untuk memaksimalkan perannya sebagai teknisi komunikasi dalam sosialisasi stunting

### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pengkajian serta mendapatkan gambaran pada skripsi, maka disusun urutan bab yaitu :

- **Bab I** membahas mengenai Latar Belakang masalah dari penelitian ini dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengetahui seperti apa peran humas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai teknisi komunikasi dalam sosialisasi stunting di Jakarta Pusat pada tahun 2023. Serta terdapat manfaat penelitian dimana manfaatnya untuk teoritis dan praktis.
- **Bab II** berisi tentang Tinjauan Pustaka. Pada tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu yang memiliki judul dan

pembahasan hampir berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu peran humas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai teknisi komunikasi dalam sosialisasi stunting di Jakarta Pusat. Kemudian kajian pustaka yang berisi tentang teori PR Excellent dan konsep tentang peran PR. Serta Menjabarkan kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis.

- **Bab III** berisi tentang Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan peneliti guna melakukan penelitian yang dijelaskan yaitu pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan secara deskriptif serta pengambilan data menggunakan kajian literatur, wawancara terstruktur dan observasi, serta dokumentasi. Kemudian narasumber penelitian dari Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni Ibu Untari Ika, S.Ikom selaku kepala seksi komunikasi dan informasi publik Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai key informan. Informan pada penelitian ini adalah tenaga ahli seksi komunikasi dan informasi publik Kota Administrasi Jakarta Pusat. Teknik pengolahan dan analisis data yang akan dilakukan hingga mendapatkan data akhir disampaikan dalam bentuk laporan, serta lokasi dan jadwal penelitian yang akan dilakukan penulis.
- **Bab IV** mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjabarkan mengenai gambaran umum objek penelitian, struktur organisasi, hasil penelitian dengan berupa wawancara terhadap peneliti dengan subjek penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
- **Bab V** mengenai Kesimpulan serta Saran, menjelaskan hasil dari penelitian terkait kesimpulan dan saran dari penulis terhadap pembahasan ini.